

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Aktor yang Terlibat dan Berkontribusi yang diberikan Oleh Para Aktor dalam Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang

Pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia sejatinya memang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kedaulatan rakyat yang dapat membentuk pemerintahan yang baik serta dapat memberikan sebuah wadah yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan rakyatnya. Pemilu dapat dikatakan sebagai pemilu yang sehat adalah yang dilakukan dengan jujur, terbuka, serta tanpa adanya tekanan dari orang lain. Pemilu memang sering di jadikan sebuah ajang pesta politik yang dilakukan oleh calon anggota yang memiliki modal cukup tinggi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mempengaruhi masyarakat atau rakyat dengan cara memberikan imbalan dan sebagainya. Dan pada kenyataannya, fenomena seperti itu tidak dapat dipungkiri karena saat ini prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dinilai memang sudah tidak berlaku dengan melihat kenyataan dari kegiatan pemilu yang terjadi di Indonesia (Lukmajati, 2016).

Fenomena politik uang semakin marak terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal yang membuat politik uang terjadi di masyarakat salah satunya adalah dengan rendahnya pendidikan masyarakat terkait pengetahuan politik pada peserta pemilu ataupun kepada masyarakat yang memiliki hak pilih. Selain itu, yang membuat politik uang ini marak dimasyarakat adalah kurangnya sebuah sosialisasi khusus praktek politik yang baik sehingga

mengakibatkan masyarakat memiliki pola pikir yang tidak memikirkan bagaimana akibatnya. Pendidikan politik ini memang sangat diperlukan agar terciptanya proses pemilihan umum yang bersih.

Sebelum gerakan desa anti politik uang digerakkan, pemerintah desa Sardonoharjo memang sudah mengalami kegelisahan terlebih dahulu.

Menurut Ibu Zakiah, beliau mengatakan:

“Kegelisahan ini ada pastinya mas, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak hanya pilkada, pilpres dan pemilihan yang lain memang politik uang sudah menjadi sesuatu yang marak. Dari situ sampai 5 tahun tidak ada proses membangun gerakan itu untuk melakukan penolakan politik uang. Padahal gerakan lama telah bermunculan, semisal adanya kekerasan ibu dan anak lalu dibangun gerakan anti kekerasan perempuan dan anak. Setelah itu, barulah Desa berupaya dengan adanya UU Desa kemudian ada upaya untuk membangun gerakan tersebut. Dari sana, Ibu mencoba bertemu dengan komponen desa, bertemu dengan orang-orang kampung. Mereka selalu bilang sulit tidak bisa. Jadi sebenarnya testimoni dari berawal ibu-ibu dasawisma itu adalah ‘susah bu, dari dulu sudah seperti itu, dari dulu ada dan itu sudah berlangsung’. Nah kira-kira begitu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Dapat dilihat pada ungkapan bu Zakiah apabila gerakan desa Anti Politik Uang ini di inisiasikan karena adanya sebuah kegelisahan yang ada di benak masyarakat desa Sardonoharjo. Dan sebab itulah ibu Zakiah bersama dengan beberapa komponen desa membuat sebuah gerakan untuk mencoba untuk menyadarkan masyarakat agar terhindar dari politik uang. Selain itu, ibu Zakiah sendiri juga mengatakan jika dalam menginisiasikan gerakan ini juga memerlukan pemikiran yang panjang agar dapat menjadi gerakan yang mampu menjadi gerakan perubahan.

“Akhirnya gerakan tersebut muncul, saya memilih pilihan ini bukannya tanpa pikir panjang. Kami sebelumnya berdiskusi panjang soal pilihan itu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Dengan hadirnya Desa Anti Politik Uang di desa Sardonoarjo diharapkan masyarakat desa Sardonoarjo dapat terdorong tekadnya untuk ikut terlibat dalam pencegahan praktik politik uang di lingkungan desa Sardonoarjo khususnya. Selain itu, Ibu Zakiah bersama dengan para komponen desa juga bersama-sama turut mensukseskan gerakan ini agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat terealisasi dengan baik di desa Sardonoarjo. Munculnya gerakan Desa Anti Politik Uang ini juga turut mendorong para masyarakat desa aktif terjun dalam kegiatan pencegahan praktik politik di desa Sardonoarjo.

Dalam proses pembentukan gerakan desa anti politik uang, pemerintah desa Sardonoarjo memberikan dukungan penuh untuk membentuk desa anti politik uang. Pemerintah desa Sardonoarjo dalam mendirikan desa anti politik uang memiliki tujuan agar dapat memberikan contoh bagi desa-desa yang lainnya untuk menghindari kegiatan politik uang. Dalam mendirikan desa anti politik uang, tentu saja banyak yang harus dilalui oleh pemerintah desa Sardonoarjo antara lain adalah dengan mengumpulkan masyarakat desa Sardonoarjo terlebih dahulu untuk di berikan pendekatan terkait desa anti politik uang dengan tujuan agar masyarakat dapat berantusias mengikuti sebuah gerakan tersebut.

Dalam berkontribusi di gerakan sosial desa Anti Politik Uang, pemerintah desa dalam menggerakkan gerakan desa Anti Politik Uang juga perlu melihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana salah satu isi didalamnya berisi mengenai pemilihan umum yang diwajibkan untuk menjamin tersalurkannya suara yang diberikan masyarakat tersebut yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maksud dari hal tersebut adalah pemerintah haruslah membebaskan masyarakatnya untuk memilih tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun melalui politik uang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 2017).

Terbentuknya desa Sardonoarjo sebagai desa anti politik uang merupakan kemauan warga desa yang di inisiasi oleh ibu Zakiah sebagai motor penggerak terbentuknya desa anti politik uang. Ibu Zakiah merupakan salah satu warga yang turut andil dalam pergerakan desa anti politik uang ini. Tim desa anti politik uang lahir atas prakarsa ibu Zakiah di bantu oleh Kepala Desa Sardonoarjo bersama dengan teman teman dari KISP sebagai tim yang dipusatkan untuk membantu dalam pergerakan desa anti politik uang yang menggandeng para warga desa Sardonoarjo untuk menjadi seorang pemilih yang anti melakukan politik uang serta untuk menyadarkan para warga agar tidak ikut andil dalam politik uang saat ini memang sedang marak dilakukan.

Politik uang yang sedang marak terjadi di negara Indonesia memberikan dampak yang sangat buruk bagi sistem demokrasinya, Hal

tersebut dikarenakan adanya sebuah permainan didalam politik yang dapat berbentuk pembelian suara atau *vote buying*, pemberian pribadi atau *individual gift* , pelayanan kesehatan dengan maksud tertentu, segala kebutuhan yang diberikan oleh masyarakat dengan maksud tertentu, serta adanya sebuah proyek *pork barrel*. Hal tersebut tentu saja diberikan dengan secara cuma cuma oleh kandidat yang akan dipilih dengan tujuan agar masyarakat memilih kandidat yang memberikan pemberian tersebut untuk menjadi seorang pemimpin.

Adanya aktor yang terlibat dalam desa anti politik uang maka diharapkan agar desa tersebut sukses dalam menggerakan gerakan tersebut karena telah didukung oleh aktor yang menginisiasi gerakan tersebut. Akan tetapi, keadaannya yaitu kurang di fasilitasi dengan maksimal oleh pihak KPU dan Bawaslu. Selain untuk menggandeng para warga dan menyadarkan para warga untuk menghindari politik uang, para aktor membuat gerakan tersebut agar terhindar dari sebuah pemimpin yang tidak jujur dan terlibat dalam politik uang. Para aktor tersebut juga memiliki tujuan lainnya yaitu untuk mencoba memutus rantai kegiatan politik uang.

Besar harapan setelah dibentuknya sebuah gerakan Desa Anti Politik Uang adalah bisa membuat desa Sardonoarjo menjadi lebih baik dan bersih dari politik uang. Selain itu pembentukan gerakan desa anti politik uang juga bertujuan untuk membuat memberi kesadaran terhadap masyarakat terkait politik uang. Dan pada akhirnya, desa Sardonoarjo sudah resmi mendeklarasikan desa tersebut sebagai Desa APU pada tanggal 16 Februari

2019. Pemerintah desa Sardonoarjo pada saat itu juga memikirkan agar gerakan ini dapat berjalan dengan efektif tentu saja turut menghadirkan banyak aktor yang terlibat untuk bertanggung jawab. Akan tetapi, apabila ditelusuri lebih jauh kembali sebenarnya memang masyarakatlah yang harus dipaksakan untuk mensukseskan gerakan ini agar turut merasa bertanggung jawab atas gerakan tersebut juga. Tetapi disamping itu juga ibu Zakiah bersama dengan jajaran pemerintah desa Sardonoarjo turut membantu didalamnya.

Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pembentukan desa anti politik uang , maka Pemerintah desa Sardonoarjo membuat Perkades atau dibuatlah sebuah landasan hukum yang telah dideklarasikan oleh Kepala Desa Sardonoarjo pada tahun 2019 ini. Peraturan tersebut dibuat tujuannya agar gerakan anti politik uang ini memiliki legitimasi yang kuat. Setelah adanya Perkades tersebut, maka aktor politik yang turut andil dalam gerakan tersebut lalu memberikan sebuah pendidikan dan pengetahuan mengenai pentingnya menghindari politik uang pada saat diadakannya sebuah pemilihan umum. Para aktor politik menghimbau kepada masyarakat untuk tersus berhati hati karena saat ini permainan dalam sebuah politik memanglah sangat mudah untuk dilakukan. Apabila masyarakat masih dirasa kurang memahami pengetahuan terkait politik uang maka sangat mudah untuk dikelabui oleh para pelaku politik uang.

Sebuah gerakan desa anti politik uang ini muncul dikarenakan adanya kerja sama antara ibu Zakiah selaku inisiator gerakan ini dengan

komponen-komponen desa. Ibu Zakiah sendiri sebelum mencetuskan gerakan ini mengatakan:

“Gerakan apa yang memungkinkan, dan setelah berpikir panjang barulah diskusi dengan desa, lalu desa menyambut dengan baik dan itupun setelah Ibu berpikir untuk menekuni UU Desa. Saat itu saya berpikir kembali apabila desa itu terlalu luas, mau dimulai dari mana jantung ini. Kalau hanya perempuan saja yang dimasuki ya tidak mungkin, hanya laki-laki yang dimasuki juga tidak mungkin. Karena yang saya tahu adalah masyarakat perempuan, laki-laki bahkan para remaja pun mengakui jika mereka menerima hasil politik uang tersebut. Berdasarkan testimoni itulah yang kemudian saya kira penting adalah menemukan dimana kemudian satu hal yang kolektif kolegal bisa dilakukan. Akhirnya disini muncul sebuah gerakan keluarga anti politik uang. Jadi basisnya kemudian harus dimulai dari keluarga.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Dapat dilihat ungkapan dari ibu Zakiah sendiri yang mengatakan apabila aktor yang penting dalam gerakan ini juga turut dibantu oleh pihak keluarga. Ibu Zakiah mengatakan jika keluarga memiliki peran yang kuat jika dibandingkan dengan mengingatkan kepada orang lain. Pada saat saya bertemu dengan ibu Zakiah, beliau juga mengatakan:

“Kami berpikir bahwa keluarga menjadi satu benteng yang bisa menjadi kelembagaan paling kecil yang bisa digunakan untuk itu dan proses saling mengingatkan di dalam keluarga itu lebih kuat dibandingkan dengan kita mengingatkan kepada orang lain. Kemudian kalau ada gerakan ibu-ibu yang dalam situasi patriarkal seperti ini, posisi ibu-ibu akan kesulitan. Kalaupun gerakan hanya untuk bapak-bapak kalau bapaknya juga terima pasti keluarganya juga akan terkontaminasi. Kita tidak bisa membiarkan itu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Ungkapan tersebut dikatakan oleh ibu Zakiah dan didukung dengan adanya sebuah sticker yang dipergunakan sebagai bahan untuk berkontribusi dalam

gerakan desa anti politik uang. Sambil mengeluarkan stickernya dan menyerahkan stickernya kepada saya, ibu Zakiah juga mengungkapkan pernyataan berikut:

“Akhirnya sticker-sticker ini muncul mas. Stickernya terpampang dan semuanya dibagi dan kami membaginya di pedukuhan. Kami juga membagi pada saat pertemuan ibu-ibu dan pertemuan lainnya. Kami berharap sticker-sticker yang dibagikan tersebut dapat ditempel dirumah agar setiap akan masuk rumah itu akan teringat akan pesan yang terkandung dalam sticker tersebut dan mengingatkan bahwa disinilah keluarga yang tidak akan menerima politik uang dalam bentuk apapun. Itu yang kemudian dilakukan mas.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Selanjutnya, Ibu Zakiah yang juga mengatakan apabila hal tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari warga terutama ibu-ibu yang memiliki keinginan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Para warga pun juga menginginkan kegiatan politik uang ini segera di hilangkan dari desa Sardonoarjo agar terbebas dari kegiatan yang sangat merugikan tersebut. Pada saat itu juga sticker-sticker langsung terpasang di rumah-rumah warga Sardonoarjo beserta beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan politik uang yang memang dipasang di dalam gang-gang di desa Sardonoarjo.

Pada saat akan mensukseskan gerakan ini, Ibu Zakiah mula-mula masuk terlebih dahulu di desa. Karena di dalam desa tersebut terdapat perangkat-perangkat desa yang turut andil dalam gerakan tersebut. Selain masuk pada perangkat desa, ibu Zakiah bersama dengan aktor lainnya masuk ke pak dukuh kemudian masuk ke karang taruna, tujuan dari ibu

Zakiah ke ranah perangkat desa lalu ke karang taruna adalah agar mereka juga dapat berperan sebagai aktor yang mensukseskan gerakan ini. Selanjutnya, ibu Zakiah pun mengarah untuk mencoba diskusi dengan mushola dengan ibu-ibu pengajian dan takmir masjid. Ibu Zakiah pun lalu mencoba untuk menyampaikan diskusi terkait adanya gerakan anti politik uang di desa Sardonoarjo. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu Zakiah, yaitu:

“Saya mencoba diskusi di mushola dengan ibu-ibu pengajian, takmir masjid. Menyampaikan gerakan anti politik uang dengan mengeluarkan sebuah ayat-ayat. Orang disitu lebih mengangguk-angguk. Saya lalu berpikir di desa ada rohis, dan kemudian agen yang kemudian yang garap adalah rohis. Saya garap rohis itu sudah akhir-akhir dan saya baru sadar kemudian kenapa rohis tidak dari dulu saya garap. Akhirnya orang harus berani ditakut-takuti apabila disini neraka tempatnya. Saat itu juga rohis digarap dengan kerja sama dengan Pandanaran untuk mengadakan pengajian rohis, sarasehan di pandanaran” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Ungkapan tersebut dikatakan oleh Ibu Zakiah yang dimana beliau mengungkapkan apabila rohis juga dapat membantu mensukseskan gerakan desa anti politik uang karena selain dengan rohis, ibu Zakiah juga bekerja sama dengan orang-orang Pandanaran demi gerakan desa anti politik uang ini berjalan dengan sesuai keinginan bersama. Selain itu, Aksi yang dilakukan oleh ibu Zakiah dengan Kades dan Sekdes desa Sardonoarjo tentu saja juga turut dibantu oleh teman-teman KISP beserta teman-teman KKN.

KISP adalah singkatan dari Komite Independen Sadar Pemilu yang merupakan sebuah kelompok yang bergerak untuk memberikan sebuah pesan-pesan moral tentang pemilu dan demokrasi kepada para masyarakat. KISP memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu dengan tujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, memberikan pengetahuan kepada para masyarakat serta memberikan kesadaran agar menghindari politik uang. KISP berisikan anak-anak muda yang peduli akan permasalahan pemilu dan demokrasi yang ada di Indonesia. KISP turut andil dalam mensukseskan gerakan desa anti politik uang di desa Sardonoharjo karena mereka telah memberikan sebuah sosialisasi terkait bahaya politik uang dan mereka juga berhasil memberikan sebuah panduan “Pemilih Cerdas”, memberikan modul desa anti politik uang serta memberikan pendidikan politik pada 18 pedukuhan.

Selain teman-teman dari KISP, ibu Zakiah juga turut dibantu oleh teman-teman KKN dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang turut membantu juga dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Teman-teman KKN itu masuk ke pedukuhan mas, terus ke beberapa tempat itu ya masuk. Saya juga terkadang mengingatkan kepada anak-anak KKN kalau akan melakukan sosialisasi itu disarankan untuk cek jadwal terlebih dahulu, jadi biar kalau di pedukuhan ada acara tidak terbentur dengan jadwal sosialisasi begitu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Ungkapan tersebut adalah ungkapan yang diberikan oleh ibu Zakiah dimana beliau memberitahukan kepada teman-teman KKN apabila akan masuk ke

pedukuhan harus melihat jadwal terlebih dahulu agar pada saat akan memberikan sosialisasi di pedukuhan yang akan dimasuki sedang ada acara.

Adapun kontribusi yang diberikan bapak Kepala Desa Sardonoarjo beserta bapak Sekretaris Desa adalah membuat perkades dan Ibu Zakiah yang membuat draftnya.

“Jadi pak kades dan pak sekdes yang membuat perkades, saya yang membuat draftnya dan selanjutnya nanti mereka akan memeriksa lalu kami berdiskusi bersama. Kira-kira dasar hukumnya pas atau tidak, karena basisnya Undang-Undang Desa ya saya memakai Undang-Undang Desa serta Undang-Undang tersebut merupakan kewenangan desa atau bukan dan desa pun berwenang untuk menentukan hal tersebut. Lalu kami menelusuri sampai disana. Dan desa pun memiliki kewenangan tersebut. Setelah itu, pak Kades pun menyetujui dan oke maka selanjutnya kita harus mencoba pak, saat itu saya bilang dengan pak Kades. Setelah semua siap, perkades itulah yang kita sebar ke pedukuhan-pedukuhan, kami tempel ke beberapa tempat yang ada disini. Hal tersebut sudah ada himbauan dari pak Kades, jadi kalau memang anda menjadi orang Sardonoarjo maka hindarilah dengan politik uang, jadi kira-kira seperti itu bahasa pesannya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Zakiah yang pada saat itu menggerakkan gerakan desa anti politik uang dengan bantuan kontribusi dari bapak Kepala Desa dan bapak Sekretaris Desa Sardonoarjo. Kontribusi yang dilakukan adalah semata mata untuk mensukseskan gerakan ini agar para masyarakat juga turut mengikuti pesan yang telah diberikan oleh pak Kades melalui perkades yang telah disebarkan di beberapa tempat yang ada di desa Sardonoarjo.

Pemerintah desa Sardonoarjo sendiri memiliki peran yang penting pada gerakan ini untuk turut mensukseskan serta untuk menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu membantu apa yang menjadai permasalahan warga. Beruntungnya, masyarakat desa Sardonoarjo memberikan respon positif dengan adanya gerakan desa anti politik uang tersebut. Peran yang diberikan oleh pemerintah desa pun turut dibutuhkan untuk membantu peningkatan dan pengembangan dari gerakan desa anti politik uang ini. Tentu saja peran yang diberikan oleh pemerintah desa tidak hanya dari pembuatan perkades saja akan tetapi juga memfasilitasi rapat dan yang lainnya. Respon positif yang di berikan oleh masyarakat desa Sardonoarjo juga tentu dapat membuat pemerintah menjadi lebih maksimal kembali dalam melaksanakan gerakan desa anti politik uang ini.

3.2 Proses pembentukan komunitas gerakan sosial desa Anti Politik Uang

Polemik mengenai politik uang memang sudah sangat santer terdengar di kalangan masyarakat dan tampaknya memang sudah menjadi sebuah tradisi pada saat akan dilakukan Pemilihan Umum. Di desa Sardonoarjo inilah merupakan salah satu desa yang turut serta memberantas politik uang dengan menerapkan sebuah landasan hukum yang memang dikhususkan untuk menolak dengan keras politik uang di Desa Sardonoarjo. Sebuah gerakan sosial demi memberantas Politik Uang pun saat ini sudah berjalan dengan maksimal demi terciptanya desa Anti Politik Uang.

Desa Sardonoarjo kini telah menjadi salah satu desa di Kabupaten Sleman yang menjadi pelopor gerakan desa anti politik uang. Hal tersebut memang menjadi sebuah kebanggaan bagi kabupaten Sleman karena salah satu desanya menjadi pelopor gerakan desa anti politik uang. Politik uang memang sudah menjadi sebuah momok saat pemilihan umum akan dilaksanakan karena hal tersebut didasari dengan unsur paksaan dan tidak dari hati dalam memilih kandidatnya.

Adapun proses yang dilakukan oleh para aktor politik yang turut andil dalam gerakan ini adalah antara lain :

1. Pra Deklarasi

Adapun pra deklarasi yang dilakukan disini adalah sebuah proses persiapan dimana gerakan tersebut akan dilaksanakan dan disahkan. Persiapan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para masyarakat desa untuk turut serta dalam pembentukan gerakan desa anti politik uang di desa Sardonoarjo. Kegiatan pra deklarasi yang dilakukan oleh para aktor pemerintah desa Sardonoarjo adalah, diantaranya berikut:

1.1) Pembentukan Organisasi

Pembentukan organisasi dilakukan agar desa Sardonoarjo memiliki sebuah tim yang khusus membahas terkait Desa Anti Politik Uang yang melibatkan perwakilan masyarakat, RT, RW, Kepala Dukuh, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa, Muslimat, Aisyiyah, Fatayat, KISP, DEMA STAISPA, Ponpes Kalimasada, PPDI, IDEA, IRE serta Badan Pengawas Pemilu Sleman. Selain itu,

pembentukan organisasi ini bertujuan agar terdapat sebuah tim untuk melakukan pemahaman terkait penghindaran politik uang.

1.2) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan oleh pemerintah desa Sardonoarjo agar dapat mensukseskan gerakan tersebut serta untuk menyatukan visi dan misi agar tercipta tujuan yang sama terhadap gerakan desa anti politik uang serta pemaparan Road Map pembentukan Desa APU. Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan perwakilan masyarakat, RT, RW, Kepala Dukuh, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa, Muslimat, Aisyiyah, Fatayat, KISP, DEMASPA, Ponpes Kalimasada, PPDI, IDEA, IRE serta Badan Pengawas Pemilu Sleman.

1.3) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk yang dilakukan dengan cara pendekatan dengan masyarakat. Sosialisasi disini dilakukan oleh teman-teman KISP dan diteruskan oleh teman-teman KKN UMY dengan memberikan pengetahuan kepada para masyarakat tentang pentingnya menghindari Politik Uang. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Sardonoarjo dilakukan mulai dengan tanggal 10 Januari 2018 dengan memulai pendekatan dengan masyarakat lalu dilakukannya sosialisasi di saat terdapat pertemuan RT, pertemuan ibu ibu dasawisma, pertemuan karang taruna dan yang lainnya.

Sosialisasi mengenai desa Anti Politik Uang yang berada di desa Sardonoarjo bertujuan agar para masyarakat desa Sardonoarjo memiliki pemahaman yang luas terkait bahayanya terlibat Politik Uang. Dalam melakukan sosialisasinya, Tim Desa Anti Politik Uang desa Sardonoarjo juga turut memberikan sebuah pendidikan politik yang telah dilaksanakan di 18 padukuhan.

2. Deklarasi

Deklarasi dilakukan setelah adanya proses pra deklarasi dilakukan. Pada tahap ini, pemerintah desa Sardonoarjo melakukan deklarasi setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman bahwa desa Sardonoarjo menjadi salah satu desa penggerak desa anti politik uang. Deklarasi yang dilaksanakan di desa Sardonoarjo bertujuan untuk mencegah terjadinya upaya menciderai Pemilu Serentak 2019 dengan perilaku tidak bermoral, seperti adanya politik uang dan untuk memberikan kesadaran tentang demokrasi dan politik yang bermartabat. Dalam pelaksanaan Deklarasi ini juga mengundang 16 Parpol, DPD, dan Tim Pemenangan Capres/Cawapres serta mensosialisasikan program TAMU JAMAK singkatan dari *Tunjukan Mukamu Jelaskan Maksudmu*, sebagai wadah untuk memberikan pemaparan caleg berdasarkan Parpol dan DPD serta Tim Pemenangan Capres/ Cawapres dan dihadiri juga oleh Komisioner BAWASLU Pusat Frizt Edward Siregar. Setelah sesi TAMU JAMAK Deklarasi dilanjutkan oleh Penandatanganan Pakta

Integritas Oleh Caleg, perwakilan dari 18 Padukuhan dan Penyelenggara Pemilu. Kemudian acara Deklarasi Diakhiri dengan pembagian sticker “ Keluarga Anti Politik Uang” dari Kepala Desa Sardonoarjo kepada Seluruh Perwakilan RT dari 18 Padukuhan

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah desa Sardonoarjo adalah bertujuan untuk memberikan pelatihan serta pemahaman yang lebih dalam terkait desa anti politik uang. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami tentang baiknya menghindari politik uang. Selain itu, bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman juga kepada para aktor politik yang ikut terlibat untuk memberikan materi kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang. Bimbingan teknik juga sempat dilakukan di Ruang sidang Fisipol kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang di inisiasi oleh teman- teman KISP

4. Aksi Bersama

Aksi bersama yang ada di desa Sardonoarjo merupakan tindakan yang juga penting di lakukan karena hal tersebut dapat memberikan pengetahuan terkait peningkatan masyarakat yang turut andil dalam pelaksanaan desa anti politik uang ini. Pemerintah desa Sardonoarjo berusaha untuk tetap menyatukan masyarakat agar dapat mencapai satu tujuan yaitu menjadikan desa Sardonoarjo menjadi desa anti politik uang. Aksi bersama ini diharapkan dapat terlaksana dengan

lancar dan baik dengan adanya keikutsertaan masyarakat bersama para aktor politik untuk mencapai tujuan yang sama.

Adapun bentuk-bentuk aksi bersama yang dilakukan di desa Sardonoharjo antara lain adalah :

1. Adanya Media Sosialisasi

Media sosial menjadi salah satu media untuk membantu yang dinilai penting untuk mensukseskan gerakan desa anti politik uang. Media sosial saat ini menjadi alat bantu untuk mensosialisasikan gerakan yang ada di desa Sardonoharjo tersebut. Media sosial yang digunakan oleh desa Sardonoharjo antara lain berbentuk seperti facebook panduan “pemilih cerdas” modul desa Anti Politik Uang, spanduk serta alat bantu lainnya. Dalam hal ini, Karang taruna desa Sardonoharjo cukup aktif dalam membantu mensosialisasikan gerakan desa anti politik dengan melalui website.

2. Posko Pengaduan Terpadu

Posko pengaduan dibentuk oleh Bawaslu Sleman yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menjadi wadah yang dapat menampung segala laporan negatif maupun laporan positif yang memiliki keterkaitan dengan politik uang. Posko pengaduan tersebut juga dibuat untuk menyediakan tempat bagi masyarakat maupun aktor pemerintah yang akan melakukan pengaduan terkait politik uang di desa Sardonoharjo.

3.3 Pasang surut dukungan terhadap ide gerakan desa Anti Politik Uang

Gerakan desa anti politik uang merupakan sebuah gerakan nyata yang memiliki tujuan untuk memberantas kegiatan politik uang di desa-desa. Karenanya, gerakan desa anti politik uang ini diciptakan di desa Sardonoarjo salah satunya untuk mengurangi tindak politik uang yang sedang terjadi di Indonesia. Sebenarnya, memang persoalan mengenai politik uang ini sudah lama terjadi dan saat ini desa Sardonoarjo sudah mulai untuk menerapkan desa anti politik uang. Dalam pembuatan gerakan ini tentu saja pernah mengalami pasang surut, sama halnya dengan Ibu Zakiah bersama dengan pemerintah desa Sardonoarjo serta pihak yang terlibat pada saat membuat sebuah gerakan desa anti politik. Adapun ibu Zakiah mengungkapkan terkait pasang surut yang terjadi di desa Sardonoarjo yaitu,

“Kalau dibilang pasang surutnya itu ya kita tidak menargetkan ya mas. Pada saat itu saya bersama dengan bapak Kepala Desa dan bapak Sekretaris Desa mengatakan bahwa puncak dari kegiatan ini bukan saat deklarasi, sehingga semua sel yang dimasuki tidak ada puncaknya. Jadi semuanya adalah puncak. Memang di beberapa desa atau tempat itu setelah deklarasi sudah selesai. Berbeda dengan kita, kita tidak menganut itu. Hal itu ya karena ada target kerja kami sampai dengan hari H pencoblosan. Jadi ya pasang surutnya itu ya pada saat tidak ada yang berusaha untuk bergerak menggerakkan. Seperti misal Bapak Dukuh sudah diberikan materi terkait politik uang tetapi beliau tidak bisa menyebarkan sendiri, dan hal itu harus didampingi oleh saya, bapak Kepala Desa Sardonoarjo, sekretaris desa ataupun anak-anak KKN yang akan masuk dalam penyelenggaraan sosialisasi.”(Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Ungkapan tersebut diungkapkan oleh ibu Zakiah yang mengungkapkan apabila pasang surut yang dialami oleh desa Sardonoarjo ketika mensukseskan gerakan ini adalah ketika tidak ada orang yang berusaha untuk bergerak atau berusaha tergugah kesadarannya untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Ibu Zakiah juga mengungkapkan jika pada saat itu memang banyak warga yang mengandalkan Ibu Zakiah bersama dengan bapak Kepala Desa Sardonoarjo dalam menggerakkan gerakan tersebut tanpa ada inisiatif dari mereka untuk mensosialisasikan desa anti politik uang sendiri, padahal memang sebelumnya mereka sudah diberikan materi terkait hal tersebut.

Pada saat diadakan sosialisasi bersama dengan ibu Zakiah dan teman-teman KISP terdapat salah satu warga yang bertanya terkait mengapa bukan Bawaslu yang memberikan sosialisasi padahal hal tersebut merupakan tugas bawaslu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memang sudah ditujukan bawaslu agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang politik uang. Selain itu juga dijelaskan apabila Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan Bawaslu tidak hanya dijadikan sebagai pengawas saja akan tetapi juga ditunjuk sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Bawaslu memiliki peran yang penting dalam pemilihan umum yaitu sebagai pengawal untuk kegiatan tersebut dalam pembuktian peran serta eksistensi yang dilakukan (Baihaki, 2018).

Di desa Sardonoarjo, sebenarnya hal tersebut merupakan sebuah kritik terbesar yang di tujukan kepada Bawaslu. Kritik tersebut ditujukan karena sosialisasi tidak pernah dilakukan dan hanya mengandalkan para volunteer saja. Apabila dilihat memang kenyataannya kinerja Bawaslu belum maksimal dalam memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat desa Sardonoarjo. Padahal, sosialisasi itu sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang. Sosialisasi memang sangat dibutuhkan karena mengingat masyarakat yang masih awam dengan masalah politik uang. masyarakat banyak yang menganggap jika masalah ini sering terjadi tetapi mereka tetap saja melakukannya. Maka dari itu sosialisasi dari pihak Bawaslu khususnya sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat tersadar dengan bahaya politik uang.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa Sardonoarjo pun belum sepenuhnya mengetahui mengenai komisioner yang datang di desa Sardonoarjo. Ibu Zakiah berpikir jika beliau dalam memilih tersebut salah dalam menyeleksi, padahal sebelumnya beliau berharap jika bisa lebih baik lagi kinerja dari komisioner tersebut. Sebenarnya komisioner itu ada, akan tetapi dalam memberikan sosialisasi tersebut kurang maksimal dalam memberikannya, akibatnya para masyarakat pun asing terhadap para komisioner tersebut. Namun, apabila tupoksi pada komisioner tersebut diwajibkan seharusnya diwilayahnya itu ya memang harus dilakukan dan divisi tersebut akan muncul. Ibu Zakiah pun menanggapi akan hal tersebut dengan ungkapan sebagai berikut,

“Tapi nampaknya semua tupoksi selalu ditarik orang keatas dan tidak pernah didorong untuk membumi, sehingga komisioner berbasis dari gerakan bawah dan komisioner tersebut lebih kepada jabatan yang kemudian mereka itu mengikuti seleksi dengan prasyarat yang teknokratif begitu, harus ada surat keterangan dari pengadilan dll, tetapi basis gerakannya tidak terkoordinir. Meskipun saat itu juga kita sudah seleksi dan sudah saya tanya apakah mempunyai basis gerakan atau tidak, walaupun punya mau dimulai darimana, secara wawancara memang sudah oke tapi realnya tidak.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Apabila dilihat kembali, dalam melaksanakan gerakan desa anti politik uang tentu saja melalui proses yang panjang seperti membuat deklarasi serta sebuah strategi dan perencanaan juga. Tetapi, lain halnya dengan desa diluar desa Sardonoarjo yang hanya melaksanakannya hanya sampai dengan deklarasi saja tanpa ada tindak lanjut. Di desa Sardonoarjo, ibu Zakiah beserta pemerintah desa Sardonoarjo membentuk gerakan desa anti politik uang dengan proses deklarasi sampai dengan pembuatan roadmap. Ibu Zakiah memaparkan pada saat itu apabila di desa Sardonoarjo memerlukan sebuah roadmap yaitu agar dapat memiliki strategi yang teratur dan perencanaan yang matang. Seperti contohnya apabila desa Sardonoarjo memiliki cita-cita agar terhindar dari politik uang maka pemerintah desa Sardonoarjo sudah mengetahui arah mana yang akan ditempuh, dan cara yang dilakukan tersebut haruslah melihat dari sebuah roadmap yang dapat menuntun untuk dapat tercapai cita-cita tersebut.

Dalam membangun basis gerakan untuk desa anti politik karena memang gerakan tersebut diperuntukan untuk daerah yang berada di desa

maka memang basisnya itu dimulai dari bawah atau bisa dikatakan bergerak dari bawah. Dan seperti yang di jelaskan jika di desa Sardonoarjo memang sudah dibuat roadmap dimana isinya sudah jelas apabila target utama yang dipilih oleh pemerintah desa Sardonoarjo beserta ibu Zakiah adalah keluarga. Keluarga dianggap mampu memberikan pengaruh lebih besar untuk gerakan desa anti politik uang ini. Sebagian orang memang dianggap masih banyak yang merasa kebingungan tentang calon anggota politik, hal tersebut dibuktikan dengan ungkapan ibu Zakiah berikut ini,

“Orang-orang itu banyak yang kebingungan untuk menentukan pilihan karena memang banyak calon-calon yang tidak diketahui, pada saat diadakan deklarasi tidak dijelaskan semuanya hanya sebagian saja. Nah akibatnya orang-orang bingung untuk memilih dan orang-orang seperti itulah yang mudah untuk dimasuki oleh politik uang. Mereka itu memiliki handphone android tapi tidak *aware* dengan sosial media. Akibatnya membuat masyarakat menerima informasi yang dirasa kurang. Hal tersebut yang memang menjadi evaluasi terbesar.” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Terkait ungkapan ibu Zakiah terkait masyarakat desa Sardonoarjo yang memang kurang *aware* terhadap sosial media mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui informasi terkait calon-calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Dan sebagai evaluasinya adalah seharusnya memang dari pihak KPU sendiri kedepannya memang harus turun tangan untuk mendorong para calon legislatif memberikan sosialisasi ataupun memperkenalkan identitas mereka sebagai calon legilatif. Hal tersebut memang sebenarnya susah untuk dilakukan karena untuk menyadarkan masyarakat tersebut tentu saja tidak mudah, memerlukan proses yang

memang cukup lama. Di desa Sardonoarjo sendiri, ibu Zakiah juga sempat mengeluhkan terkait masyarakat yang masih terbawa kebiasaan lama yaitu masih sering menerima politik uang dari calon legislatif untuk menentukan pilihannya. Seperti misalnya kalimat “Wani piro aku kon milih kowe?”, hal seperti itulah yang terkadang masih terjadi di kalangan masyarakat yang masih terbuai dengan politik uang.

3.4 Upaya perluasan keterlibatan masyarakat terhadap aktifitas gerakan desa Anti Politik Uang

Masyarakat menurut (Koentjaraningrat, 2009: 115 118) adalah sekelompok orang yang didalamnya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Masyarakat sendiri dalam bahasa inggris berarti *society* serta dalam bahasa Arab berarti *syaraka* yang artinya adalah berpartisipasi atau ikut serta. Masyarakat disini memiliki peran yang penting untuk mensukseskan gerakan desa Anti Politik Uang ini. Dengan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa Sardonoarjo dalam menanggulangi politik uang di desa Sardonoarjo.

Untuk upaya proses pembentukan gerakan desa Anti Politik Uang tidak terlepas oleh sikap tanggap dari Ibu Zakiah yang turut membantu dalam pembentukan gerakan tersebut. Adapun cara yang ditempuh oleh ibu Zakiah beserta aktor politik yang terlibat adalah dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh ibu Zakiah beserta aktor politik lainnya yaitu dengan memberikan

pemahaman yang matang terkait pentingnya menghindari politik uang saat akan dilangsungkan pemilihan umum.

Pemerintah desa Sardonoarjo memberikan pemahaman tentang desa Anti Politik Uang antara lain adalah kepada para masyarakat desa Sardonoarjo, para pelajar, para pemilih pemula yang pemahamannya dirasa masih kurang, karang taruna desa Sardonoarjo, PPDI, dan kepada penyandang difabel. Pemerintah desa Sardonoarjo pada saat itu memiliki harapan agar kelompok diatas dapat memberikan dukungan yang kuat untuk mewujudkan desa Sardonoarjo menjadi desa Anti Politik Uang.

Menurut ibu Zakiah, metode paling ampuh untuk memperluas jaringan adalah dengan mengajak mereka untuk mendukung kegiatan gerakan ini. Semisal terdapat acara di desa tersebut maka kesadaran masyarakat adalah dengan cara memberikan stiker-stiker ataupun pemahaman terkait desa anti politik tersebut. Untuk masyarakat yang turut andil dalam kegiatan tersebut juga disarankan untuk memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui terkait gerakan yang sudah dijalankan di desa Sardonoarjo. Adapun kegiatan tersebut adalah dengan menyuruh masyarakat untuk memasang stiker-stiker disekitar rumah mereka agar mereka dapat selalu mengingat akan slogan tersebut. Beberapa langkah-langkah kecil inilah yang senantiasa akan menyadarkan masyarakat agar dapat tersadarkan dan menghindari kegiatan politik uang.

Dalam mengupayakan perluasan keterlibatan masyarakat di desa Sardonoharjo adalah salah satunya memang terdapat di pedukuhan. Hal tersebut karena di dalam pedukuhan tersebut terdapat masyarakat yang dinilai mampu untuk mensukseskan gerakan ini. Cara yang dilakukan adalah dengan masuk ke dalam kelompok perempuan yaitu di grup pkk ataupun dasawisma. Selain itu juga dapat masuk di dala kelompok para remaja yaitu grup karang taruna. Menurut ibu Zakiah, pada saat kelompok karang taruna di desa Sardonoharjo sedang menghadapi perlombaan maka banyak teman-teman dari karang taruna tersebut tidak dapat ikut aktif, akan tetapi juga ada beberapa dari anggota karang taruna tersebut yang ikut terlibat dalam proses membangun gerakan Desa Anti Politik Uang.

Untuk perluasan yang lainnya, ibu Zakiah mengatakan bahwa perluasan jaringan yang lainnya adalah dari rois.

“Perluasan yang lain adalah melalui rois. Setelah kami analisis, kelompok keagamaan dianggap sebagai kelompok yang perlu dikuatkan keberadaannya karena bicara anti politik uang pada akhirnya warga percaya bahwa ini diharamkan dan dari situlah kemudian legitimasi dari para kiai dari para rois menjadi sangat penting untuk kemudian bisa menyebarluaskan ini di kelompok-kelompok keagamaan. Roislah yang kemudian masuk ke mushola-mushola. Roislah yang masuk di acara-acara keagamaan. Dan dari sanalah kelompok-kelompok masyarakat tersebut akan mendengar legitimasi terkait agama yang kemudian konsep dari anti politik uang berada pada kontes keagamaan yang didalamnya menjelaskan bahwa hal tersebut adalah haram dilakukan” (Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah selaku Inisiator gerakan Desa Anti Politik Uang, 09 Oktober 2019).

Melihat ungkapan yang diberikan oleh ibu Zakiah bahwa rois menjadi salah satu faktor perluasan jaringan karena rois dapat memberikan

dampak yang baik untuk gerakan tersebut. Penyebaran gerakan desa anti politik uang melibatkan rois karena nantinya rois sendiri akan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat terkait bahaya politik uang. Rois dinilai banyak memberikan dampak yang baik bagi desa Sardonoarjo karena rois sering melakukan dakwah-dakwah kepada masyarakat dan rois pun juga dinilai dapat mengembangkan perluasan jaringan terhadap keterlibatannya dalam gerakan desa anti politik uang.